

Pemda Berperan Penting Gerakkan Pelayanan Kepemudaan

YOGYA (KR) - Keberadaan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah (RAD), layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing.



KR-Istimewa

Wagub DIY menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada para pemuda penerima penghargaan Kemempora RI.

"Kami mengajak untuk bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda. Di antaranya melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Upaya itu dilakukan dalam bentuk pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah," kata Marsda TNI Dr Purwoko Aji Prabowo MM

MDS, saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Stadion Mandala Krida, Senin (28/10).

Hadir dalam upacara itu Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X, sekaligus menyerahkan piala dan pi-

agam penghargaan kepada para pemuda penerima penghargaan Kemempora RI. Pemberian piala sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemu-

da Indonesia dalam berbagai bidang Pembangunan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya menyampaikan, peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan

tema Maju Bersama Indonesia Raya, mengingatkan bagaimana menyatukan dan membangun kembali semangat pemuda. Dengan begitu mampu mendukung pemerintah dan negara untuk bersama-sama

membangun bangsa. "Harapan kedepan pemuda kita semakin memiliki peran dan kesempatan yang luas untuk ikut berperan serta dalam pembangunan," ucapnya. (Ria)-d

Pertamina Edukasi Penerima Beasiswa

YOGYA (KR) - Pertamina melalui Pertamina Foundation menggelar kegiatan Cross Visit Desa Energi Berdikari Sobot Bumi (DEB SoBI) kedua di Yogyakarta pada 23-24 Oktober 2024 yang diikuti oleh 11 mitra perguruan tinggi Beasiswa Pertamina Sobot Bumi. Kegiatan mengangkat tema 'Desikasi Bumi untuk Desa Energi Berdikari'.

Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) M Erry Sugiharto, membuka kegiatan dan menyampaikan apresiasi kepada penerima beasiswa. "Apresiasi yang setinggi-tingginya karena kalian tidak hanya sebagai penerima beasiswa tetapi juga menjadi agen Sustainable Development Goals (SDG)," katanya.

Dalam kegiatan cross visit, para peserta yang terdiri dari perwakilan penerima beasiswa dan mentor dari akademisi perguruan tinggi, diberikan edukasi tentang pemberdayaan masyarakat, energi bersih, gaya hidup ramah lingkungan hingga budaya tradisional.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi program Desa Energi Berdikari Sobot Bumi (DEB SoBI) yang mereka jalankan di desa masing-masing menggunakan analisis PESTEL (political,

economic, social, technological, environmental, dan legal).

"Analisis PESTEL membantu para penerima beasiswa bersama mentor dari program DEB SoBI untuk memetakan kendala dan permasalahan dari program yang sudah mereka jalankan. Dengan pemetaan tersebut, solusi dapat ditemukan dan program mereka bisa membawa manfaat yang berkelanjutan," ujar Wakil Ketua III STT Migas Balikpapan Karnila Willard SE BA MBA selaku pemandu FGD.

Selain pembelajaran dalam ruangan, para peserta juga melakukan kunjungan ke program binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) yang mendapatkan pengakuan dalam penghargaan Proper Emas 2023, yakni Rumah Produksi Tempe Koro di Dusun Babakan, Desa Poncosari, Srandakan Bantul.

Terakhir, para peserta diajak untuk melihat implementasi program Desa Energi Berdikari Sobot Bumi (DEB SoBI) milik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Dusun Banteran, Desa Donoharjo, Ngaglik Sleman. Terdapat Omah Joglo Tanjung yang usianya sudah lebih dari 200 tahun, menjadi destinasi wisata budaya tradisional di Sleman. (Dev)-d

KRISNADI SETYAWAN Pengawal Keistimewaan, Tegas Menolak Bisnis Miras



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Warga Rotowijayan Kraton, Krisnadi Setyawan, kembali mendapat amanah di DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2024-2029. Pria yang juga Wakil Gubernur (Wagub) DIY aktif sebagai pengawal Keistimewaan Yogyakarta ini secara tegas menolak bisnis minuman keras (miras)

ekonomi di Kota Yogya. Idealnya setiap sekian persen pertumbuhan ekonomi seharusnya selaras dengan terbukanya lapangan pekerjaan. "Apakah isu miras juga seperti itu. Dengan dalih kurangnya lapangan kerja kemudian sebaran miras ini diizinkan. Jangan sampai isunya wisata tapi industri yang ditumbuhkan justru yang berdampak negatif di masyarakat," urai politisi dari Partai Gerindra ini.

Aktivistis relawan buruh dan relawan kebencanaan ini rencananya akan duduk di Komisi B yang membidangi masalah ekonomi maupun pariwisata. Oleh karena itu Krisnadi sudah menyiapkan langkah untuk menelisik pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat namun realitas saat ini angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan masih belum terentaskan. Sehingga dalam setiap rapat kerja bersama mitra eksekutif, dirinya akan mengawal realisasi APBD agar berbasis investasi di samping mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal ini karena banyak ekonomi kreatif yang tumbuh sendiri di masyarakat tanpa dukungan APBD. Beberapa program yang didanai pemerintah dan digadang menjadi pengungkit ekonomi namun justru hasilnya sama sekali tidak terlihat. Sebagai contoh penataan Kotabaru di kawasan Jalan Suroto namun yang tumbuh justru di kawasan lain yang tidak tersentuh penataan.

Kemudian penataan Malioboro yang justru memantapkan ekonomi PKL. "Tentu harus jeli dan kreatif dalam mengalokasikan APBD yang berbasis investasi. Sehingga APBD harus benar-benar menjalankan roda ekonomi yang baik, bukan sebaliknya," tandas pria 42 tahun ini. (Dhi)-d



KR-Ardhi Wahdan

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN JADI SKALA PRIORITAS

Jaga Marwah DPRD, Bangun Kolaborasi



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Pimpinan definitif DPRD Kota Yogyakarta masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Peresmian tersebut digelar melalui sidang paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta di gedung dewan, Senin (28/10) oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Tuty Budhi Utami SH MH. Pelantikan mengacu pada SK Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tertanggal 17 Oktober 2024.

Jajaran Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta yang terdiri dari FX Wisnu Sabdono Putro SH MH (Ketua), Sinariyati Nujanat SE (Wakil Ketua) dan Triyono Hari Kuncoro (Wakil Ketua) bertanggung jawab sekaligus menjadi simbol dalam menjaga marwah lembaga dewan. Ketiga pimpinan dewan itu pun diharapkan segera membangun kolaborasi dan sinergi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Yogya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro mengharapkan kerja sama seluruh anggota dewan agar mampu menjalankan tugas secara amanah serta menjaga marwah lembaga dewan. Menurutnya, ketugasan yang sudah di depan mata ialah pembentukan alat kelengkapan dewan sesuai kebutuhan. Melalui alat kelengkapan itu pula kinerja dewan baru bisa berjalan secara sempurna. Yakni meliputi kinerja budjeting atau penganggaran, legislasi atau

perundangan, dan monitoring atau pengawasan. "Tugas yang sangat mendesak untuk dibahas oleh alat kelengkapan ialah pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 serta RAPBD Kota Yogya tahun 2025," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinariyati Nujanat, menegaskan pembentukan alat kelengkapan dewan memang harus menjadi skala prioritas utama. Alat kelengkapan itu meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Dirinya berharap dalam waktu sepekan ke depan seluruh alat kelengkapan tersebut sudah bisa terbentuk. Hal ini karena tanpa ada alat kelengkapan maka ketugasan dewan belum bisa dijalankan. Apalagi waktu yang tersedia untuk menuntaskan pekerjaan yang sifatnya wajib sangat terbatas.

Pekerjaan wajib yang harus dituntaskan tersebut ialah RAPBD Kota Yogya 2025. RAPBD itu harus sudah ditetapkan melalui sidang paripurna paling lambat pada akhir November tahun ini. Sebelumnya, Propemperda 2025 juga



KR-Ardhi Wahdan

Jajaran Pimpinan DPRD Kota Yogya bersama Pj Walikota, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0734 dan Kapolresta Yogya.

harus sudah selesai terlebih dahulu lantaran masuk dalam RAPBD 2025. Belum lagi anggota dewan periode sebelumnya atau 2019-2024 masih melimpahkan empat pansus yang harus diselesaikan tahun ini juga. "Waktunya memang sangat mepet, dan harapan kami semua yang sudah diantisipasi dalam APBD 2024 juga bisa diselesaikan," katanya.

Oleh karena target waktu yang sudah mepet maka dibutuhkan kesamaan pandangan dan kesamaan pendapat dari seluruh anggota dewan, serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Sinariyati yang mewakili Fraksi Partai Gerindra pun berharap alat kelengkapan dewan bisa segera terbentuk melalui proses musyawarah mufakat tanpa ada dinamika yang justru bisa mengikis

waktu yang tersisa.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro. Wakil dari PKS ini menyebut, pihaknya akan menjembatani komunikasi antar fraksi yang ada di lembaga dewan agar tidak terjadi tarik ulur. Sesuai tata tertib, keanggotaan setiap alat kelengkapan dewan diusulkan oleh masing-masing fraksi. Setelah itu

jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan ditentukan oleh masing-masing anggota. Seluruh mekanisme itu diharapkan mampu diselesaikan secara musyawarah serta mengedepankan dialog.

Terkait tahapan Pilkada 2024 yang juga sedang berjalan, Kuncoro berharap dinamika Pilkada tidak menghambat kinerja dewan. Hal ini karena ada

ruang yang berbeda antara dinamika Pilkada dengan proses pembentukan alat kelengkapan dewan. "Semangat lembaga dewan adalah kolektif kolegial. Sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh fraksi agar memiliki tekad dan semangat yang sama dalam mempercepat pembentukan alat kelengkapan," terangnya.

Harapan juga disampaikan Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto. Menurutnya, jajaran eksekutif sudah menyelesaikan naskah RAPBD maupun usulan Propemperda untuk tahun 2025. Hanya, naskah itu belum bisa dibahas manakala alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Sehingga dirinya menyambut baik pelantikan pimpinan definitif lantaran sudah memiliki wewenang untuk membentuk alat kelengkapan dewan. "Tentu selamat dan sukses atas peresmian pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Semoga alat kelengkapan dewan bisa segera terbentuk sehingga anggota dewan bisa berkarya sesuai yang menjadi amanah. Kami juga sangat berharap ada kolaborasi antar Forkompimda karena kami yang di eksekutif tentu tidak bisa berjalan sendiri," harapnya. (Dhi)



KR-Ardhi Wahdan

Pimpinan DPRD Kota Yogya memimpin sidang paripurna usai diambil sumpah/janji.



KR-Ardhi Wahdan

Rekan sejawat anggota DPRD Kota Yogya memberikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan dewan.